

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DI DKI JAKARTA

Muh. Kadarisman

Program Magister Ilmu Administrasi UMJ
kadarisman.bkn@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to analyze the empowerment of communities in improving competitiveness areas in Jakarta. This study uses a qualitative method. The results of the research, that the Jakarta public in general has demonstrated his ability by increasing capacity in the chores or their jobs. The ability of the people of Jakarta is essentially composed of two sets of factors, namely the intellectual ability and physical ability. Jakarta public has confidence to manage the program and take decisions independently, so as to explore the potential, initiative and creativity of the community. Furthermore, the growing competitiveness of the area indicated by the achievement of growth and the higher level of prosperity and sustainable, open to domestic and international competition, and the ability to further optimize natural resources and human resources and potentially more excavated. Knowledge and comparative advantages of the area, can be used by policy makers to encourage changes in the economic structure of Jakarta Capital City towards sectors that have competitive advantages.

Keywords: community development, regional competitiveness

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan daya saing di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Jakarta secara umum menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengerjakan kewajiban atau pekerjaannya. Kemampuan masyarakat Jakarta terdiri dari 2 faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Masyarakat Jakarta memiliki kepercayaan diri untuk mengelola program dan mengambil keputusan secara mandiri, sehingga mengembangkan potensi, inisiatif dan kreativitas masyarakat. Selain itu, peningkatan daya saing daerah diindikasikan dengan pencapaian pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional, dan kemampuan untuk terus mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pengetahuan dan keunggulan komparatif daerah dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mendorong perubahan dalam struktur ekonomi Ibukota Jakarta menuju sektor-sektor yang memiliki keunggulan daya saing.

Keywords: pemberdayaan komunitas, persaingan domestik

PENDAHULUAN

Tujuan mendasar pemberian otonomi kepada daerah di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta di antaranya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. DKI Jakarta, kini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Kota Jakarta sebagai daerah yang terus tumbuh berkembang ke arah perubahan-perubahan yang lebih baik, guna memajukan daerah ini menuju kejayaannya. Namun demikian, dalam mencapai tujuan perubahan ke arah kemajuan tersebut, DKI Jakarta dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti banjir, kemacetan, keamanan/kriminalitas, kemiskinan, korupsi, daya saing daerah yang rendah dan lainnya yang perlu untuk segera diatasi dan diselesaikan.

Pemerintah DKI Jakarta merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengatasi antaranya permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah tersebut secara efektif dan efisien, di dengan lebih memberdayakan masyarakatnya dan meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan masyarakat Kota Jakarta sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan menengah ke bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat DKI Jakarta dapat dipahami juga dengan cara pandang bahwa pemberdaya-

an dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab pemerintah.

Selanjutnya, pemberian layanan publik (perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain) kepada masyarakat DKI Jakarta, tentu merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah DKI Jakarta secara *given*. Namun, semua permasalahan tersebut hingga sekarang belum mampu diatasi secara optimal, sehingga masyarakat pun belum merasakan hasil-hasilnya dengan memuaskan (Ife, 2006). Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi, kreativitas, dan inovasi dalam mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan keterlibatan aktif dalam menentukan proses politik, hukum, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya di ranah pemerintahan (Rizqinna, 2010). Jadi masyarakat DKI Jakarta secara aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Terkait hal ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat menegaskan, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk

mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, inti pemberdayaan masyarakat adalah strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya (Adi, 2012). Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian-nya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya.

Terkait hal ini, yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat DKI Jakarta dalam penelitian ini adalah suatu proses meningkatkan kemampuan masyarakat di DKI Jakarta, sehingga mereka dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepada mereka kepercayaan untuk mengelola program-program tertentu atas keputusannya sendiri (Bryan dan White, 1989) bahwa pemberdayaan masyarakat di pahami sebagai suatu proses meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mereka dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepada mereka kepercayaan untuk mengelola program-program tertentu atas keputusannya sendiri. Dari konsep pemberdayaan yang dikemuka-

kan oleh Bryan dan White tersebut mengandung beberapa dimensi dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: 1) proses meningkatkan kemampuan masyarakat; 2) pemecahan masalah; 3) memberikan kepercayaan; 4) pengelolaan program; dan 5) membuat keputusan sendiri.

Dengan pemberdayaan masyarakat tersebut, maka diharapkan terjadinya peningkatan daya saing daerah di DKI Jakarta dalam percaturan regional, nasional mau pun global. Pada dasarnya sebuah wilayah yang memiliki suatu produk akan berhasil bila produk yang dibuatnya/diciptakan memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain, sehingga harga yang akan dibuatnya semakin tinggi. Maka dari itu, kini banyak produk yang dipasarkan sehingga muncul sebuah daya saing yang ketat dan yang memenuhi syarat pengujian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan terbuka pada persaingan domestik dan internasional, serta kemampuan untuk lebih mengoptimalkan lagi sumber daya alam agar lebih tergalai dan berpotensi, sehingga pengetahuan dan keunggulan komparatif daerah tersebut dapat digunakan para pengambil kebijakan untuk mendorong perubahan struktur perekonomian daerah ke arah sektor yang memiliki keunggulan kompetitif (Suharto, 1997).

Lebih lanjut ditegaskan bahwa yang dimaksud potensi daerah di sini meliputi SDA, SDM, dan sumber daya buatan yang dapat

dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dimensi atas aspek daya saing daerah DKI Jakarta di sini adalah 1) Kemampuan daerah mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan tinggi dan berkelanjutan; 2) Terbuka pada persaingan domestik dan internasional; 3) Kemampuan mengoptimalkan sumber daya alam; 4) Pengetahuan dan keunggulan komparatif daerah; 5) Perubahan struktur perekonomian daerah menuju keunggulan kompetitif. Daya saing daerah di DKI Jakarta tersebut, menjadi sesuatu hal yang sangat penting guna menghadapi era globalisasi. Era global di sini menciptakan persaingan ekonomi yang semakin ketat antarnegara, misalnya dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Ditegaskan bahwa daya saing daerah di DKI Jakarta harus dipacu secara maksimal, dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia, variabel-variabel ekonomi, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Tentu saja, guna mencapai hasil yang ideal tersebut saatnya sekarang untuk bekerja lebih keras dan komitmen tinggi untuk semua pihak yang terlibat di dalamnya. Ditegaskan, bahwa banyak hal yang harus diperhatikan dan dilakukan pelaku usaha di DKI Jakarta untuk memasarkan produknya. Pasalnya, produk yang dihasilkan tersebut harus mampu bersaing dengan banyaknya produk asing yang masuk di DKI Jakarta mau pun memasarkan produk lokal ke ranah ekspor. Dalam kaitan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi DKI Jakarta telah dan

akan melakukan berbagai upaya agar para pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing industri dengan produk luar, sehingga mampu bersaing dan mengunggulkan produk lokal ciptaannya.

Namun, upaya tersebut ternyata hingga sekarang belum mampu dicapai sebagaimana yang diharapkan. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam menciptakan kemampuan daya saing daerah di DKI Jakarta, di antaranya adalah faktor kualitas SDM masyarakat yang masih rendah, sarana dan prasarana daerah yang masih terbatas, kemampuan kreativitas dan inovasi masyarakat yang belum optimal, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, karena dilakukan dengan memahami, mengamati dan menangkap realitas/fenomena empirik menggunakan latar alamiah terkait pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan daya saing di DKI Jakarta, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan instrumen wawancara, pengamatan/observasi, *focus group discussion* (FGD) sebagai data primer, dan pemanfaatan dokumen, buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya, *visual images* yaitu *tape cassette* dan *handycam* sebagai data sekunder. Jadi, penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, dan gambaran secara holistik (Cresswell, 2002).

Penelitian ini lebih melihat perspektif emik, yaitu memandang sesuatu upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci (*indept interview*), mengalami dan menemukan *verstehen*, *uniqueness* sedalam-dalamnya, meneliti suatu gejala, mengamati kausalitas empirik, mengungkap proses dan menemukan makna, melakukan instruspeksi, retrospeksi, menggambarkan sebagaimana adanya dan akhirnya membentuk teori dari data. Dalam penelitian dengan desain kualitatif ini, penentuan informan menjadi sesuatu yang *urgen*. Informan, merupakan sumber data primer dan penentuannya dilakukan secara *purposive* yaitu penetapan Informan dengan penunjukan langsung oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa informan tersebut benar-benar memahami substansi penelitian (Moleong, 2006). Informan sebanyak 15 orang, yaitu dari kalangan pegawai di Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 10 orang dan Informan berasal dari *stakeholder* (masyarakat dan pengusaha) sebanyak 5 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat DKI Jakarta

Kemampuan Masyarakat DKI Jakarta Memecahkan Masalah

Dalam bahasan ini, para Informan memberikan penjelasan bahwa kemampuan masyarakat pada umumnya dalam memecahkan masalah terutama sekali terhadap problematika kehidupan ekonomi yang masyarakat hadapi sudah cukup baik. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kemampuan masyarakat di sini

maknaanya adalah bahwa masyarakat yang di dalamnya terdiri dari berbagai individu, kelompok, dan profesi telah menunjukkan peningkatan kapasitasnya untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Ditegaskan bahwa seluruh kemampuan seseorang sebagai anggota masyarakat pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang diperlukan oleh masyarakat guna melakukan kegiatan mental atau spiritual, misalnya kemampuan berpikir memecahkan problem kehidupan ekonomi, sosial, dan lain-lain yang masyarakat hadapi sehari-hari.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa kemampuan fisik masyarakat di sini adalah kemampuan yang diperlukan masyarakat untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut kekuatan, stamina, kecekatan, dan keterampilan yang diperlukan guna mengatasi beban kehidupan masyarakat. Adanya peningkatan kemampuan masyarakat DKI Jakarta baik secara intelektual mau pun fisik tersebut, maka masyarakat telah dan akan memberikan kontribusi secara maksimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Ibukota Negara ini. Hasil FGD menunjukkan bahwa kemampuan intelektual masyarakat tersebut hanya dapat dicapai apabila Pemerintah DKI Jakarta secara sungguh-sungguh memperhatikan masalah-masalah terkait kebutuhan mereka seperti pendidikan, baik pendidikan formal mau pun pendidikan informal/ non formal.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa peningkatan kemampuan masyarakat di DKI Jakarta secara fisik hanya dapat dicapai apabila Pemerintah DKI Jakarta secara sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan di mana mereka tinggal. Informasi tersebut didukung hasil proses triangulasi bahwa dimensi kemampuan masyarakat terkait upaya pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta tersebut bertalian erat dengan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka. Kepedulian dan kesediaan masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi di bidang kesehatan tersebut merupakan bukti adanya kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Gambaran kondisi tersebut, juga ditunjukkan dengan hasil observasi bahwa kemampuan masyarakat pada umumnya di Jakarta untuk berkembang secara mandiri berkorelasi positif dengan kemampuannya untuk berpartisipasi dan juga kemampuannya untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri.

Lebih lanjut dikemukakan, hal ini memberikan kejelasan bahwa hanya pada masyarakat yang memiliki kemampuan, maka partisipasi tersebut dapat di wujudkan. Dengan demikian, antara kemampuan masyarakat umum di Jakarta dan partisipasi publik/masyarakat ibarat dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dan perlu dibedakan. Berdasarkan pengamatan ini menunjukkan, bahwa masyarakat di Jakarta yang berpartisipasi adalah masyarakat yang memahami potensi dan kemampuannya termasuk ham-

batan-hambatan di lapangan, karena mereka menyadari atas keterbatasannya. Masyarakat Jakarta yang mampu berdiri sendiri, adalah masyarakat yang mengetahui arah hidup dan perkembangannya termasuk kemampuannya untuk berkomunikasi dengan lingkungannya dan bekerja sama dengan masyarakat lainnya, bahkan pada tingkat regional dan internasional.

Hal yang dapat dielaborasi lebih dalam, telah menjadi jelas bahwa dalam pemberdayaan masyarakat di Ibukota Jakarta tersebut partisipasi masyarakatnya sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kemampuan pemahaman akan sesuatu yang diketahui masyarakat Jakarta, maka terbukti semakin tinggi pula partisipasi masyarakat yang bersangkutan dalam setiap kegiatan, program maupun proyek yang dilaksanakan di mana masyarakat Jakarta tersebut berada. Ditegaskan bahwa secara analitik, kemampuan masyarakat Jakarta dalam memahami permasalahannya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, adalah kemampuan kognitif masyarakat yaitu kemampuan untuk mengetahui atau dalam arti kata yang lebih dalam berupa mengerti, memahami, menghayati, dan mengingat apa yang diketahui masyarakat tersebut, dan sebagai landasan kognitif di sini adalah rasio atau akal.

Berikut kedua, yaitu kemampuan afektif masyarakat. Hal ini berupa kemampuan untuk merasakan tentang yang diketahuinya itu, misalnya rasa puas atas prestasi yang telah diraih masyarakat Jakarta dengan per-

juangan keras sehingga meraih sebagai penyelenggara daerah otonom terbaik ke dua tingkat nasional. Ketiga, adalah kemampuan konatif masyarakat Jakarta, yaitu kemampuan untuk mencapai apa yang dirasakan masyarakat tersebut. Konasi di sini adalah *will* atau karsa atau kemauan, keinginan, hasrat berupa daya dorong untuk mencapai atau menjauhi segala apa yang didiktekan oleh rasa. Ditegaskan di sini, bahwa rasa yang memutuskan apakah sesuatu prestasi tersebut dinyatakan memuaskan atau tidak memuaskan atas prestasi masyarakat Jakarta tersebut, dan menjadi sifat manusia/masyarakat untuk menginginkan/mendekati apa yang diinginkan tersebut. Sebaliknya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, kekuatan manusia/masyarakat untuk bergerak mendekati atau menjauh dari prestasi masyarakat tersebut adalah kemampuan konatif.

Kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta, bahwa kemampuan masyarakat Jakarta untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kotanya. Apabila kemampuan masyarakat meningkat, maka diharapkan masyarakat akan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Permasalahan yang di hadapai oleh masyarakat sangat beragam yang menyangkut permasalahan: pendidikan, kesehatan, pendapatan, meningkat ke permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Jadi, pemecahan masalah (*problem solving*) adalah fungsi utama dari pikiran dan telah lama di teliti oleh psikologi

kognitif. Secara umum, pikiran kemudian dianggap sebagai rangkaian proses manipulasi simbol yang menggunakan ingatan yang bekerja sangat terbatas, dan di dukung oleh ingatan jangka panjang yang ekstensif.

Permasalahan masyarakat adalah permasalahan sosial, yaitu sebagai kondisi yang tidak diinginkan, tidak adil, berbahaya, ofensif dan dalam pengertian tertentu mengancam kehidupan masyarakat. Dengan konsepsi permasalahan sosial yang dikemukakan itu menunjukkan bahwa permasalahan masyarakat pada intinya adalah mengancam kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga tidaklah beralasan sekiranya permasalahan itu di intervensi secara jauh oleh Pemerintah dan mengabaikan keterlibatan masyarakat yang memahami masalahnya sendiri. Sekiranya, permasalahan masyarakat itu di kembalikan kepada masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat terlebih dahulu di bekal dengan kemampuan yang memadai (baik intelektualnya maupun fisiknya), maka dapat di pastikan masyarakat itu sendiri akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapinya.

Pemberian Kepercayaan Mengelola Program dan Keputusan Sendiri

Terkait bahasan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta tersebut terdapat pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola program dan keputusannya sendiri, para Informan mengemukakan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta kepada masyarakat Jakarta mengelola program dan keputusan sendiri, hal ini dapat menggali potensi-potensi, ini-

siatif dan kreativitas masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan sikap dan tindakannya (perilaku) yang sesuai dengan latar belakang historis kehidupan masyarakat tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat Jakarta yang latar belakang historisnya penuh dengan dinamika perjuangan akan menerima setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dengan sikap kritis. Apabila masyarakat telah memperoleh kepercayaan, maka mereka akan mengelola program berdasarkan kreativitas, inisiatif dan inovasi yang mereka miliki.

Dengan demikian, apabila masyarakat telah memiliki kemampuan, dapat memecahkan masalahnya sendiri, telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dalam mengelola berbagai program kegiatan, maka dapat dipastikan masyarakat tersebut sudah dapat mengambil keputusan sendiri sesuai keinginan dan kebutuhan serta berbagai permasalahan yang dihadapinya tanpa terus bergantung kepada pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemecahan masalah dan pengambilan keputusan merupakan kejadian yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam manajemen modern, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan menjadi semakin penting dan merupakan kebutuhan mutlak bagi seseorang atau masyarakat. Menguasai kemampuan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan diperlukan suatu pola pikir tertentu dan teknik-teknik yang merupakan prasyarat yang harus di pahami. Selain itu juga dituntut kemampuan analisis yang tangguh, karena

salah dalam mengambil keputusan akan berakibat fatal bagi keberhasilan organisasi.

Hasil triangulasi menunjukkan bahwa pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi yang selanjutnya mengambil keputusan sendiri atas program tersebut. Secara rinci dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lain-lain. Jadi, partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat sehingga mampu menghasilkan keputusan sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor.

Keterangan di atas, selanjutnya dikonfirmasi dengan hasil observasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat umum di Jakarta dalam berpartisipasi, yaitu:1) Usia. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari

kelompok usia lainnya. 2) Jenis kelamin. Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai daerah mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah di dapur yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

Berikut angka 3) Pendidikan. Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 4) Pekerjaan dan penghasilan. Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

Hasil FGD menunjukkan bahwa peranan kunci dalam pemberdayaan masyarakat Jakarta adalah memberikan kepercayaan masyarakat atau dalam istilah manajemen dan organisasi disebut *delegation of authority*. Hal ini berarti bahwa sebagai pendelegasian wewenang kepada bawahan dan yang diberikan wewenang mempunyai kemampuan untuk

melaksanakannya. Konsekuensi ini adalah pihak yang diberi pelimpahan wewenang akan berusaha sekuat tenaga untuk memperlihatkan kemampuannya serta keberanian untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreatifitasnya. Secara psikologis ia mempunyai rasa percaya diri dan keberanian untuk bersikap. Dalam mengambil keputusan, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang suatu masalah. Dalam kegiatan penemuan masalah mengacu kepada proses pengidentifikasian masalah untuk mendapatkan masalahnya secara jelas, sebelum melangkah kepada cara pemecahannya.

Dalam kegiatan penemuan masalah tersebut akan menyangkut penentuan keberadaannya dan pentingnya masalah. Kegiatan pemecahan masalah dimulai dengan pendagnosaan masalah untuk menemukan sebab sebenarnya. Kegiatan ini dilanjutkan dengan membuat alternatif pemecahan masalah. Setelah alternatif pemecahan masalah dilakukan, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi dan pemilihan alternatif. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan pengambilan keputusan formal, yakni bagaimana masyarakat secara sistematis mengusahakan tercapainya keputusan yang sehat dan masuk akal yang dapat dikatakan sebagai keputusan yang berkualitas.

Dayasaing Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kemampuan DKI Jakarta Mencapai Pertumbuhan, Kesejahteraan Tinggi, dan Keberlanjutan

Terkait bahasan ini, para Informan menjelaskan bahwa kemampuan daerah mencapai pertumbuhan di sini adalah pertumbuhan ekonomi di Jakarta, yaitu proses perubahan kondisi perekonomian di Jakarta secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Jakarta dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi di Jakarta merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonominya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa saat ini masyarakat Ibukota Jakarta dalam fase berkembang, untuk itu potensi-potensi yang dimiliki harus terus dikembangkan terutama potensi yang ada di beberapa Kelurahan atau Kecamatan yang selama ini masih belum optimal pengembangannya.

Hasil FGD menunjukkan bahwa terdapat dua potensi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan daerah, yaitu sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Kedua sumber daya tersebut harus saling mendukung dan melengkapi, pengembangan SDA harus dibarengi dengan peningkatan SDM-nya. Kegiatan pengembangan masyarakat di Jakarta merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan secara keseluruhan dan juga pengembangan

kelompok-kelompok tertentu di Jakarta. Pengembangan masyarakat Jakarta di sini biasa dikenal dengan istilah pemberdayaan (*empowerment*) yaitu pemberdayaan yang berpusat pada rakyat, sehingga rakyat berperan aktif dalam proses pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan.

Setiap Kecamatan di DKI Jakarta memiliki potensi, kondisi daerah, dan karakteristik masyarakat yang juga beragam. Untuk itu dalam upaya pemberdayaan masyarakat, masyarakat di Kelurahan setempat harus lebih banyak terlibat dalam kegiatan tersebut. Karena masyarakatnya yang lebih mengetahui potensi dan kondisi kecamatannya. Pemerintah DKI Jakarta hanya bertindak sebagai fasilitator yang mendukung program pemberdayaan ini. Namun, pemberdayaan masyarakat tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, karena yang menjadi subyek dari pemberdayaan adalah masyarakat di DKI Jakarta itu sendiri. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa tahun belakangan ini di Provinsi DKI Jakarta sudah ada beberapa program pemberdayaan masyarakat, misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bantuan Langsung Tunai (BLT), kredit untuk usaha mikro, dan *homeindustry* (industri rumah).

Program pemberdayaan masyarakat di Jakarta tersebut bertujuan untuk menciptakan manfaat sosial, melalui proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh keuntungan dari hasil usaha mereka. Hal-hal yang perlu dielaborasi, bahwa sebenarnya terdapat banyak upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia pada umumnya sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dari sekian banyaknya terdapat satu usaha yang sudah diselenggarakan 6 tahun lalu dan sekarang masih tetap dikembangkan di wilayah DKI Jakarta, karena banyak memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu PNPM-Mandiri. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, PNPM Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat di Jakarta yang mengusahakan semua warganya bisa berpartisipasi langsung untuk membangun daerahnya, sehingga setiap warga bisa merasakan proses dalam pencapaian kesejahteraan yang direncanakan.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Jakarta tersebut memang tidaklah mudah, dibutuhkan program-program yang tepat dalam menjalankannya. PNPM-Mandiri adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang dititikberatkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin. Berikut beberapa langkah yang di tempuh dalam mencapai hal ter-

sebut antara lain: 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam masyarakat.

Berikut 6) Selain itu PNPM Mandiri juga membangun dan memberikan layanan seperti: a) Membangun sarana prasarana pendukung bagi desa/kelurahan yang membutuhkan dan diperuntukkan penciptaan lapangan kerja didesa/kelurahan, terutama bagi rumah tangga miskin, meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kualitas kegiatan dengan penggunaan teknologi sederhana, meningkatkan ketrampilan masyarakat desa/kelurahan dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan pemeliharaan prasarana, dalam teknis pelaksanaan, sehingga dengan hal itu maka pendapatan masyarakat dapat meningkat. b) Dalam bidang pendidikan, PNPM Mandiri juga ikut memperbaiki, karena bidang pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokratis pada Musyawarah Desa/Kelurahan dan Musyawarah Antar Desa/Kelurahan.

Selanjutnya, terkait bahasan tentang pembangunan keberlanjutan dalam pemberdayaan masyarakat di sini, para Informan mengemukakan bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pemahaman keberlan-

jutan pun paling tidak mengandung dua dimensi yaitu dimensi waktu, karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Sedangkan pembangunan berkelanjutan di sini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (*well-being*) generasi mendatang.

Terbuka Persaingan Domestik dan Internasional

Hasil FGD menunjukkan bahwa daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu kata kunci yang lekat dengan pembangunan ekonomi di Jakarta. Daya saing daerah Ibukota Jakarta merupakan salah satu isu sentral, terutama bagi kota Jakarta sebagai tempat dan tujuan utama pencari kerja dan mengamankan stabilitas ketenagakerjaan secara global, namun tetap mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal/daerah. Lebih lanjut dikemukakan bahwa yang dimaksud "daerah" dalam hal ini adalah area/wilayah geografis tertentu di dalam negara yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk pengertian ini, maka

DKI Jakarta merupakan bagian integral dari wilayah Negara Republik Indonesia karena sebagai pusat pemerintahan, tempat/kantor perwakilan/kedutaan besar Negara-negara asing dan sebagai pusat bisnis/perdagangan berskala internasional.

Dari hasil wawancara mendalam dengan para Informan mempertegas bahwa daya saing Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah kemampuan DKI Jakarta, masyarakat Jakarta, dan Pemerintah DKI Jakarta dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan terbuka pada persaingan domestik dan internasional, serta kemampuan untuk lebih mengoptimalkan lagi sumber daya alam agar lebih tergalikan dan berpotensi, sehingga pengetahuan dan keunggulan komparatif daerah tersebut dapat digunakan para pengambil kebijakan untuk mendorong perubahan struktur perekonomian DKI Jakarta ke arah sektor yang memiliki keunggulan kompetitif.

Hasil proses triangulasi mengilustrasikan, bahwa hubungan antara daya saing produk, organisasi/perusahaan, dan daerah, pada dasarnya adalah produk yang berdaya saing unggul dan hanya akan dihasilkan oleh perusahaan/ organisasi yang berdaya saing unggul juga. Perusahaan atau organisasi yang berdaya saing /unggul hanya akan berkembang dalam lingkungan industri yang berdaya saing/ unggul. Industri yang berdaya saing/ unggul hanya akan berkembang di lokasi/daerah yang juga berdaya saing/unggul. Jika pun dalam kenyataannya ada produk organisasi/perusahaan/industri yang berdaya

ya saing berkembang di “daerah yang tidak memiliki daya saing,” maka sebenarnya hal demikian lebih merupakan “pengecualian” semata dan/atau keunggulannya pun sebenarnya tidak berkelanjutan atau tidak memiliki *sustainable advantage*.

Selanjutnya, hasil triangulasi dan observasi menjelaskan alasan mengapa perusahaan-perusahaan di Jakarta melakukan ekspansi ke pasar dunia: 1) Untuk memasuki akses terhadap pelanggan-pelanggan baru, dengan alasan bahwa ekspansi ke dalam pasar dunia akan memberi potensi untuk meningkatkan pendapatan, laba dan pertumbuhan jangka panjang, dan dapat menjadi perusahaan domestik yang mapan. 2) Untuk mencapai biaya rendah dan meningkatkan daya saing perusahaan. Banyak perusahaan melakukan perluasan usaha karena pasar domestik dan industri mereka sudah terbatas, sehingga dengan demikian pada hakikatnya meningkatkan daya saing perusahaan. 3) Untuk mengkapitalisasi kompetensi utamanya. Sebuah perusahaan dapat memperluas kompetensi dan kapabilitasnya untuk posisi memperoleh keuntungan kompetitif dalam pasar luar negeri seperti pada pasar domestik. 4) Untuk menyebar atau membagi risiko bisnisnya melalui perluasan pasar yang telah ada.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat pemilihan strategi untuk memasuki pasar persaingan luar negeri, yaitu dengan cara: 1) Tetap mempertahankan (satu negara) barang nasional basis produksi dan ekspor ke pasar luar negeri, baik menggunakan saluran

distribusi ke depan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan asing. 2) Lisensi asing untuk menggunakan teknologi perusahaan guna memproduksi dan mendistribusikan produk-produk perusahaan. 3) Menggunakan strategi waralaba. 4) Mengikuti strategi yang dipakai oleh banyak negara, berbagai pendekatan strategis perusahaan, mungkin sedikit tetapi mungkin banyak dari negara ke negara sesuai dengan kondisi lokal dan berbeda selera dan preferensi pembeli. 5) Mengikuti strategi global, dengan menggunakan pendekatan dasarnya strategi yang sama kompetitif di semua pasar negara di mana perusahaan memiliki suatu kehadiran. 6) Menggunakan aliansi strategis atau usaha patungan dengan perusahaan asing sebagai kendaraan utama memasuki pasar luar negeri.

Dalam kaitan ini, hasil FGD menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi dasar bagi perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri: 1) *Export Strategy*. Mempertahankan produksi berbasis nasional dan mengekspor barang-barang ke pasar luar negeri dengan menggunakan jalur pengawasan distribusi. Dengan memakai pabrik dalam negeri (domestik) sebagai suatu basis produksi untuk mengekspor barang-barang keluar negeri adalah suatu strategi yang terbaik untuk mengejar penjualan internasional. Keuntungan dari strategi ekspor ini antara lain meminimumkan risiko dan persyaratan modal dan meminimumkan investasi secara langsung di negara-negara asing. Suatu strategi ekspor mudah diserang jika biaya-biaya manufaktur di negara asal lebih besar daripada di

negara-negara asing ketika pesaing-pesaing mempunyai pabrik, selain itu juga melibatkan biaya *shipping* yang tinggi serta fluktuasi yang merugikan dan pertukaran nilai tukar mata uang.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa strategi ekspor rentan ketika biaya produksi a) di dalam negeri jauh lebih tinggi daripada di negara-negara asing di mana saingan memiliki tanaman; b) biaya pengiriman produk ke pasar luar negeri jauh relatif tinggi; atau c) pergeseran buruk terjadi pada nilai tukar mata uang. 2) *Licensing Strategy*. Strategi ini dilakukan jika perusahaan mempunyai kemampuan secara teknis tetapi tidak mempunyai kemampuan secara internasional untuk memasuki pasar luar negeri dan adanya keinginan untuk menghindari risiko pada saat mengirimkan atau memasukkan sumberdaya ke pasar yang mana tidak lazim, kondisi politik yang mudah berubah dan ketidakstabilan ekonomi. 3) *Franchising Strategy*. Strategi ini dilakukan oleh perusahaan jasa dan retail yang melakukan ekspansi global. Keuntungan strategi ini antara lain *franchises* membawa serta biaya-biaya dan risiko dalam menetapkan lokasi/tempat aktivitasnya dan juga franchisor hanya melakukan pengeluaran untuk rekrutmen sumberdaya manusia, pelatihan.

Kerugiannya adalah bahwa franchisor harus selalu menjaga kualitas dari produk tersebut. waralaba asing tidak selalu menunjukkan komitmen yang kuat untuk konsistensi dan standarisasi terutama ketika budaya lokal tidak menekankan kondisi sama ma-

salah kualitas. Sementara lisensi bekerja dengan baik untuk memproduksi dan pemilik teknologi eksklusif, waralaba sering lebih sesuai dengan upaya ekspansi global bertahan dan perusahaan ritel. Di samping itu, terdapat pula **Strategi Multicountry** atau **Strategi Global**. Strategi *Multicountry* ini perusahaan mengikuti strategi perusahaan-perusahaan negara lainnya, dengan memvariasikan pendekatan strategi perusahaan sesuai kondisi lokal. Dalam strategi global perusahaan menggunakan pendekatan strategi yang sama dengan perusahaan lainnya di mana perusahaan itu sudah ada yang melibatkan koordinasi strategi secara global dan penjualan dilakukan dalam jumlah yang banyak dan jika tidak semua, maka negara berada pada suatu pasar yang penting. Dalam strategi ini aktivitas atau pekerjaan terbaik terjadi ketika persyaratan atau keperluan produk dan pembeli/konsumen sama antara negara yang satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa daya saing DKI Jakarta merupakan kemampuan daerah ini menciptakan dan mengembangkan serta menawarkan iklim/lingkungan yang produktif bagi bisnis dan inovasi, sehingga merupakan daya tarik atau menarik "investasi," talenta (*talented people*), dan faktor-faktor mudah bergerak (*mobile factors*) lainnya, serta potensi berkinerja unggul yang berkelanjutan, atau secara umum dapat dikatakan sebagai kemampuan DKI Jakarta untuk menghasilkan tingkat pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi dalam pengaruh

persaingan eksternal. Dalam konteks Pemerintahan DKI Jakarta, daya saing daerah merupakan kombinasi antara faktor ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, sumberdaya manusia, dan teknologi yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa daya saing jelas melibatkan berbagai dimensi yang berbeda yang berinteraksi satu dengan yang lain, serta kompleksitas faktor-faktor pembentuk daya saing dalam konteks daerah, yakni daya saing dalam suatu wilayah dalam suatu negara terlihat juga dari beragamnya indikator yang ditampilkan dari berbagai studi yang dilakukan dengan latar belakangnya yang berbeda-beda. Dari berbagai studi yang mengukur daya saing daerah pendekatan yang lazim dipergunakan adalah faktor-faktor yang membentuk daya saing dan *output* dari kemampuan ekonomi suatu daerah. Dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, indikator daya saing daerah terdiri dari; perekonomian daerah, kelembagaan publik, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Kualitas kelembagaan publik, infrastruktur yang terdapat di suatu daerah (DKI Jakarta) yang berpengaruh terhadap pilihan-pilihan untuk melakukan aktivitas ekonomi di daerah ini, karena berdampak pada efisiensi produksi.

Hal yang perlu dielaborasi lebih lanjut, bahwa terkait dengan daya saing nasional, peringkat Indonesia masih berada di bawah dan masih perlu meningkatkan daya saingnya. Berdasarkan *World Economic Forum*

(*WEF*) dalam *Global Competitiveness* Tahun 2015-2016 dari hasil survei peringkat daya saing 144 negara, Indonesia masih berada pada peringkat ke-37, daya saing nasional ini juga mencerminkan daya saing daerah. Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah tersebut, sebenarnya telah banyak daerah termasuk DKI Jakarta melakukan berbagai inovasi, dan beberapa daerah yang dianggap berhasil telah melakukan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerahnya.

Kemampuan Optimalisasi SDA, SDM, Pengetahuan, Keunggulan Komparatif, dan Kompetitif

Hasil wawancara mendalam terhadap para Informan menunjukkan bahwa terkait kemampuan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan adalah pengelolaan SDA yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia atau penduduk DKI Jakarta saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang. Lebih lanjut dikemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta, yaitu: 1) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. SDM merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan di Jakarta, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana SDM-nya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan di Jakarta

dengan membangun berbagai infrastrukturnya.

Berikut 2) Sumber Daya Alam (SDA). Sebagian besar negara berkembang (termasuk Indonesia) masih bertumpu kepada SDA dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, SDA saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan SDM-nya dalam mengelola SDA yang tersedia. SDA yang dimaksud di antaranya adalah kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut. Untuk DKI Jakarta, tentu tidak memiliki semuanya. Hasil FGD menunjukkan bahwa pengelolaan SDA yang berkelanjutan harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pemenuhan kebutuhan penduduk DKI Jakarta saat ini dan tidak mengorbankan kebutuhan penduduk di masa mendatang; 2) Tidak melampaui daya dukung lingkungan (ekosistem); 3) Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan menyeimbangkan kebutuhan manusia dan kemampuan mengolah dengan ketersediaan SDA.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa SDA di Jakarta dapat berkelanjutan, jika SDA tersebut yang dikelola tergolong SDA yang dapat diperbarui. SDA yang tidak dapat diperbarui tidak tergolong pada sumber daya yang berkelanjutan karena pada periode tertentu sumber daya tersebut akan habis. SDA yang akan habis hanya dapat dihemat dalam penggunaannya, sehingga dapat memperpanjang umur kegunaan dari sumber daya tersebut. Pemanfaatan SDA yang berkelanjutan pertimbangannya tidak hanya pada

aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, melainkan mencakup kelestarian SDA dan hubungannya dengan lingkungan yang terdapat di sekitarnya. Hasil proses triangulasi menunjukkan bahwa DKI Jakarta adalah termasuk daerah persaingan *multicountry*, terdapat banyak jenis *cross-country* dalam pasarnya dan perusahaan bersaing untuk memimpin persaingan pasar di antara para pesaing dalam satu negara secara terbuka dan terhadap negara lainnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat karakteristik atau gambaran dalam persaingan *multicountry* seperti DKI Jakarta ini, yaitu: 1) Pembeli dari berbagai daerah bahkan Negara-negara lain yang berbeda tertarik pada atribut-atribut produk yang berbeda. 2) Penjual bervariasi dari daerah dan Negara ke negara. 3) Kondisi industri dan kekuatan persaingan di tiap pasar nasional berbeda. Hasil triangulasi selanjutnya menjelaskan bahwa dalam persaingan pasar global, harga-harga dan kondisi-kondisi persaingan pasar lintas negara (*cross-country*) mempunyai hubungan yang sangat kuat, sehingga membentuk pasar dunia dalam arti yang sebenarnya. Adapun beberapa karakteristik atau gambaran dalam persaingan global adalah sebagai berikut: a) Kondisi persaingan dalam pasar *cross-country* mempunyai hubungan yang kuat di dalam beberapa pesaing dalam pasar yang sama; b) Posisi persaingan suatu perusahaan dalam satu negara dipengaruhi oleh posisi negara lainnya; c) Keunggulan bersaing didasarkan suatu perusahaan yang mempunyai operasi yang luas dan berskala global.

Dari hasil observasi menjelaskan terkait dengan upaya pengembangan SDM di DKI Jakarta, bahwa pengembangan SDM di Jakarta adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di DKI Jakarta dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidak terhindarnya keikutsertaan masyarakat Jakarta dalam proses global yang sedang berlangsung saat ini. Proses ini tentu membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional khususnya bagi Jakarta. Hal yang perlu dicegah adalah bahwa masyarakat DKI Jakarta tidak perlu hanyut tanpa kendali dalam arus globalisasi ini, bahkan tenggelam di dalamnya. Proses globalisasi di DKI Jakarta akan berwujud proses dehumanisasi, yaitu pada waktu yang bersamaan, masyarakat di DKI Jakarta juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu maju.

Oleh karena itu, DKI Jakarta perlu terus melakukan pembangunan daerahnya menjadi daerah yang lebih maju dan mandiri. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya tersebut, sehingga mengharuskan DKI Jakarta mengembangkan konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya. Atas dasar itu, untuk mencapai tujuan pembangunan di DKI Jakarta yang demikian, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dengan kualitas SDM-nya. Indikator pembangunan SDM di DKI Jakarta adalah sebagai ukuran pembangunan yang

sejajar dengan indikator pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan. Peningkatan kualitas SDM di Jakarta adalah sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan penduduk DKI Jakarta seutuhnya dan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang lebih besar. Keseluruhannya mencakup pembangunan masyarakat Jakarta, baik sebagai insan maupun sumber daya pembangunan manusia sebagai insan memberikan tekanan pada harkat, hak, dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan.

Selanjutnya, dalam era globalisasi pengetahuan, manajemen pengetahuan (*knowledge management*) mendapat perhatian khusus terutama di DKI Jakarta ini. Hasil wawancara dengan para Informan menunjukkan bahwa kini manajemen pengetahuan mulai banyak dikenal didunia bisnis. Para pemimpin organisasi mulai memahami proses kreasi pengetahuan sebagai keunggulan daya saing perusahaan dengan memobilisasi pengetahuan karyawan dan menumbuhkan lingkungan belajar. Perlu ditegaskan di sini bahwa makna dari pengetahuan yaitu pengetahuan sebagai hasil refleksi dan pengalaman seseorang, sehingga pengetahuan selalu dipunyai oleh individu atau kelompok. Pengetahuan melekat dalam bahasa, aturan-aturan dan prosedur-prosedur, serta konsep. Penjelasan ini diperkuat hasil FGD bahwa pengetahuan pada dasarnya dapat terbagi menjadi dua dimensi. *Tacit knowledge* adalah pengetahuan yang

didapatkan dari pengalaman, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan susah didefinisikan yang biasanya dibagikan lewat diskusi-diskusi.

Dengan demikian, *tacit knowledge* dimaknakan sebagai suatu pengetahuan yang personal, spesifik, dan umumnya sulit diformalisasi dan dikomunikasi kepada pihak lain. Lebih lanjut dijelaskan tentang *explicit knowledge* yaitu pengetahuan yang sudah diformulasikan, biasanya disajikan dalam bentuk tulisan misalnya peraturan, buku-buku, literatur-literatur. Dalam organisasi proses penyebaran/*sharing* pengetahuan akan membantu pencapaian tujuan organisasi. Jadi, *explicit knowledge* adalah sebagai pengetahuan yang dapat ditransformasikan dalam bentuk formal dan bahasa yang sistematis, dan dalam mentransformasikannya adalah dari pengetahuan *tacit* menjadi pengetahuan *eksplisit*.

Hasil triangulasi menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan di sini adalah sebuah proses perencanaan dan pengontrolan kinerja aktivitas tentang pembentukan proses pengetahuan. Atau manajemen pengetahuan sebagai suatu proses yang dapat menolong organisasi menemukan, memilih, menyebarkan, dan memindahkan informasi yang penting dan diperlukan untuk berbagai aktivitas seperti penyelesaian masalah, proses pembelajaran yang dinamis, serta strategi perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, secara umum, manajemen pengetahuan adalah sebuah proses yang mengoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya, terkait

keunggulan komparatif di sini, hasil FGD menegaskan bahwa keunggulan komparatif DKI Jakarta merupakan keunggulan-keunggulan yang dimiliki daerah ini seperti SDM, fasilitas, dan kekayaan lainnya, yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi atau perpaduan keunggulan beberapa organisasi pemerintahan di DKI Jakarta untuk mencapai visi, misi dan tujuan bersama.

Begitu pula terkait dengan keunggulan kompetitif DKI Jakarta, hasil FGD menjelaskan bahwa hal ini merujuk pada kemampuan sebuah organisasi (Pemerintah DKI Jakarta) untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada suatu posisi yang menguntungkan berkaitan dengan perusahaan lainnya. Keunggulan kompetitif muncul bila pelanggan merasa bahwa mereka menerima nilai lebih dari transaksi yang dilakukan dengan sebuah organisasi pesaingnya. Keunggulan kompetitif DKI Jakarta tersebut bersifat kompetisi atau persaingan. Bertitik tolak keterangan tersebut, maka keunggulan kompetitif yang dimiliki DKI Jakarta tersebut adalah keunggulan yang dipergunakan untuk berkompetisi dan bersaing dengan organisasi lainnya, untuk mendapatkan sesuatu.

SIMPULAN

Masyarakat Jakarta pada umumnya telah menunjukkan kemampuannya berupa peningkatan kapasitasnya dalam mengerjakan berbagai tugas atau pekerjaan mereka. Kemampuan masyarakat Jakarta pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fi-

sik. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang diperlukan oleh masyarakat Jakarta guna melakukan kegiatan mental atau spiritual, misalnya kemampuan berpikir memecahkan problem kehidupan ekonomi, sosial, dan lain-lain yang masyarakat hadapi sehari-hari.

Di samping itu, kepada masyarakat Jakarta terdapat kepercayaan untuk mengelola program dan mengambil keputusannya secara mandiri pula. Kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah DKI Jakarta kepada masyarakat Jakarta tersebut, sehingga mampu menggali potensi-potensi, inisiatif dan kreativitas masyarakat. Masyarakat mampu memberikan sikap dan tindakannya (perilaku) sesuai dengan latar belakang historis kehidupan masyarakat tersebut. Dalam kehidupan masyarakat Jakarta yang latar belakang historisnya penuh dengan dinamika perjuangan, akan menerima setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dengan sikap kritis. Masyarakat telah memperoleh kepercayaan, maka mereka mengelola program berdasarkan kreativitas, inisiatif dan inovasi yang mereka miliki.

Selanjutnya, kemampuan daerah di Jakarta mencapai pertumbuhan ekonomi, yaitu proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Jakarta ditunjukkan pada proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi di Jakarta merupakan indika-

si keberhasilan pembangunan ekonominya. Saat ini masyarakat Ibukota Jakarta dalam fase berkembang, untuk itu potensi-potensi yang dimiliki harus terus dikembangkan terutama potensi yang ada di beberapa Kelurahan atau Kecamatan yang selama ini masih belum optimal pengembangannya.

Daya saing DKI Jakarta adalah ditunjukkan dengan kemampuan DKI Jakarta, masyarakat Jakarta, dan Pemerintah DKI Jakarta dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi dan berkelanjutan dengan terbuka pada persaingan domestik dan internasional, serta kemampuan untuk lebih mengoptimalkan lagi sumber daya alam agar lebih tergalai dan berpotensi, sehingga pengetahuan dan keunggulan komparatif daerah tersebut dapat digunakan para pengambil kebijakan untuk mendorong perubahan struktur perekonomian DKI Jakarta ke arah sektor yang memiliki keunggulan kompetitif.

Pengembangan SDM di Jakarta merupakan bagian dari proses dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di DKI Jakarta dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat, dan tidak terhindarnya keikutsertaan masyarakat Jakarta dalam proses global yang sedang berlangsung saat ini. Proses ini tentu membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional khususnya bagi Jakarta. Hal yang perlu dicegah adalah bahwa masyarakat DKI Jakarta tidak perlu hanyut tanpa kendali dalam arus globalisasi tersebut, bahkan

tenggelam di dalamnya. Proses globalisasi di DKI Jakarta berwujud proses dehumanisasi, yaitu pada waktu yang bersamaan, masyarakat di DKI Jakarta juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, John W. 2002. *Research Design. Quantitative & Qualitative Approaches*, New York: Sage Publication, Inc.
- Moleong, J. Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cetakan 22.
- Ife, Jim, 2006. *Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rizqinna, Finna, 2010. *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Adi, Rukminto, Isbandi, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi, 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: